

Implementasi Manajemen Strategik Program Pendidikan Dan Latihan Kebijakan Revolusi Mental

Kapitan Kelibai¹
Suryadi²
Bedjo Sujanto³

Abstract

This study aims to determine and mean descriptively the implementation of strategic management of educational programs and the training of mental revolution policies. Data collection methods that are owned are through observation, interviews, field notes and documents that can be accounted for. Data analysis method is carried out data analysis techniques obtained through the type of research both through secondary data and primary data, then analyzed descriptively and conclusively concluded. Data analysis includes testing, grouping and testing or collecting data / evidence to draw research results in the form of descriptions written in narratives to complete the overall picture. The results of the study found in this study are mental revolution education and training have a strategic, practical, and massive management system to improve the way of thinking, ways of working and ways of life for Praja Pioneers of the Mental Revolution (PPRM), the Pioneer of the Mental Revolution (KPRM) and the Revolutionary Mental Revolutionary Apparatus (APRM). The findings of this study are the implementation of education and mental revolution training there are two educational processes in it, namely formal education and informal education. The goal is the value of the mental revolution can change the character and character or mental of the apparatus and also understand strategic management (Planning, Implementation and Monitoring / Evaluation).

Keywords: Strategic Management, Education and Training, Policy Program, Mental Revolution

PENDAHULUAN

Pembangunan SDM, menjadi *urgen* dan mendasar bagi kebutuhan dalam mengelola, merencanakan, dan melaksanakan berbagai bentuk kebutuhan dalam dirinya sendiri, kelompok maupun organisasi/lembaga. Hal ini, dapat dilihat dalam proses transformasi yang terbuka, mengalami perubahan yang cepat maka, dapat diamati perkembangan dunia dan perkembangan berbagai perilaku manusia secara kontinu sudah berlangsung, terjadi secara *global, regional* maupun nasional.

Dalam proses untuk melakukan timbal-balik dan menjadi jawaban atas problem-problem tersebut maka, lebih terarah pada proses peningkatan SDM, terutama pada lembaga/instansi pemerintahan maupun swasta untuk merubah pola berfikir, meningkatkan

etos kerja yang tinggi, serta dapat meningkatkan sikap kerjasama yang baik atau lebih pada nilai kegotong-royongan. Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Bangsa dan Negara, karena budaya tersebut menjadi sebuah budaya yang *original* dan tertanam sejak dari jaman dahulu kala, sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, atau Bangsa ini meraih kemerdekaannya.

Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemerintah atau Negara harus memiliki paradigma yang tepat dan dapat diterima serta menjadi tujuan dan target yang terukur untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan maju. Paradigma tersebut adalah revolusi mental terutama pada lembaga/instansi pemerintahan

¹ Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Email: kapitankelibai@gmail.com
[HP. 085197308338-082133166788](tel:085197308338-082133166788)

² Universitas Negeri Jakarta

³ Universitas Negeri Jakarta

dan swasta yang terlibat sebagai penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dalam Jansen Sinamo (2014:10), bahwa revolusi mental dimulainya dari masing-masing diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan Negara.

Hendrik Lim (2016:22), mengatakan revolusi mental adalah berarti sebuah kesadaran atau penerimaan untuk menggugat, melawan, membongkar cengkaman kuasa *subconsciousness* - suatu jerat pemikiran lama yang terpola - atau sering disebut dengan *efek conditioning*.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka revolusi mental sangat layak menjadi paradigma konseptual untuk membangun dan menata, secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pemikiran yang bersifat terbuka, profesional, akuntabel, dan loyalitas yang tinggi bagi pemimpin maupun manajer/pengelola dalam lembaga/instansi pemerintahan.

Oleh Karena itu, perlu adanya sistem pengelolaan yang tepat, memiliki perencanaan yang terukur agar dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama baik di lingkup organisasi, perkantoran dan lain sebagainya. Untuk lebih tersusun secara sistematis maka, perlu perencanaan yang strategis dalam pengelolaannya, secara terukur, dan berkelanjutan. Maka, membutuhkan manajemen dalam pengukuran dan sistemnya berkelanjutan. Karena manajemen yang tepat adalah Manajemen Strategik berperan sebagai ukuran yang tepat dan dapat berkelanjutan dalam membuat perencanaan.

Manajemen strategik merancang secara komprehensif untuk menyusun perencanaan yang tepat, efektif dan efisien, serta berkesinambungan.

Menurut Stephen dan Mary (2005:218) Manajemen Strategik, memiliki berbagai tata pengelolaan yang sistematis untuk mencapai tujuan menuju sebuah perubahan dengan segala

bentuk risiko yang dihadapi, dan akan terjadi. Manajemen strategik adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategik mencakup semua dasar fungsi manajemen yakni strategi organisasi harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan.

Oleh karena manajemen strategik sangat penting dalam proses telah mencakup visi dan misi, sasaran, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan target. Hal ini, merupakan salah satu strategi peningkatan sumber daya manusia dalam berperilaku, bertindak, dan berorganisasi.

Selanjutnya, Michael A. Hitt, R. Duanne Ireland, dan Robert E. Hoslisson (2014:15), yang dikutip oleh H. Rachmat, menyebutkan bahwa manajemen strategik adalah proses untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi hal-hal yang ingin dicapai dan cara mencapai hasil yang bernilai.

Berdasarkan pengertian tersebut maka, pada hakekatnya manajemen strategik merupakan pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif dan efisien lembaga/instansi mencapai tujuannya.

Keputusan/kebijakan perumusan strategis akan mendorong suatu organisasi berkomitmen pada produk, sumber daya dan teknologi spesifik yang berkelanjutan dengan kurun waktu yang lama, strategi sangat menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Menurut David (2009:6) Penyusunan strategi mengharuskan lembaga/instansi untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan/keputusan untuk memotivasi para staf/karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang sportif pada strategis, penciptaan struktur organisasi yang efektif dan relevan sesuai dengan penyiapan yang telah tersedia. Proses manajemen strategik terdiri atas tiga tahap

yaitu: perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi.

Hal ini, dapat diartikan bahwa, dalam membuat sebuah perencanaan dan mengonsepan sebuah program tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan untuk mencapai perubahan yang signifikan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Olehnya itu, perlu adanya program pengambilan kebijakan/keputusan strategis agar dapat diimplementasikan dalam sistem organisasi atau lembaga/instansi.

Pemerintahan saat ini telah menggaungkan kembali program yang memokuskan pada revolusi mental di seluruh sistem serta para stackholder baik secara vertikal maupun horisontal di semua lembaga Negara. Keberanian dalam menggaungkan kembali spirit revolusi mental. Sebuah pemikiran analitis kolektif secara nasional yang hilang ditelan bumi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Revolusi mental sebenarnya telah disampaikan oleh pendiri Negara ini dan Presiden pertama di Indonesia pada peringatan 17 Agustus 1956, Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mendeck/ berhenti. Padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan seutuhnya belum tercapai. Pembangunan fisik setelah kemerdekaan sudah dijawab, dapat kita lihat hasilnya, berbagai gedung pencakar langit begitu megah, jalan tol, infratraktur di daerah juga sudah menunjukkan hasil nyata, namun perlu disadari masih banyak kekurangan.

Era globalisasi sudah merambah dinegeri ini, dimana batas-batas geografi, social budaya menjadi kurang penting. kita juga mengalami krisis nilai dan karakter, krisis pemerintah, krisis relasi sosial. Perlunya revolusi mental adalah karena penyakit seperti emosi/mental/jiwa akan berdampak pada individu seperti malasnya seseorang dan tidak mempunyai karakter. Kemudian dampaknya akan menular kepada masyarakat yang ditandai dengan gangguan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kecemburuan sosial, dan ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, akan berdampak negatif pada bangsa dan

negara. Bangsa kita akan lemah dan menjadi tidak bermartabat. Kemudian produktivitas dan daya saing kita menjadi rendah.

Menurut Stephen dan Mery (2005:218) Manajemen strategik merancang secara komprehensif untuk menyusun perencanaan yang tepat, efektif dan efesien, serta berkesenambungan. Manajemen Strategik, memiliki berbagai tata pengelolaan yang sistematis untuk mencapai tujuan menuju sebuah perubahan dengan segala bentuk risiko yang dihadapi, dan akan terjadi. Manajemen strategik adalah sekelompok keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Manajemen strategik mencakup semua dasar fungsi manajemen yakni strategi organisasi harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan.

Oleh karena manajemen strategik sangat penting dalam proses telah mencakup visi dan misi, sasaran, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan target. Hal ini, merupakan salah satu strategi peningkatan sumber daya manusia dalam berperilaku, bertindak, dan berorganisasi.

Selanjutnya, Michael A. Hitt, R. Duanne Ireland, dan Robert E. Hoslisson, yang dikutip oleh H. Rachmat (2014:15), menyebutkan bahwa manajemen strategik adalah proses untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi hal-hal yang ingin dicapai dan cara mencapai hasil yang bernilai.

Berdasarkan pengertian tersebut maka, pada hakekatnya manajemen strategik merupakan pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif dan efisien lembaga/instansi mencapai tujuannya. Keputusan/kebijakan perumusan strategis akan mendorong suatu organisasi berkomitmen pada produk, sumber daya dan teknologi spesifik yang berkelanjutan dengan kurun waktu yang lama, strategi sangat menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Penyusunan strategi mengharuskan lembaga/insatansi untuk menetapkan tujuan,

membuat kebijakan/keputusan untuk memotivasi para staf/karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang sportif pada strategis, penciptaan struktur organisasi yang efektif dan relevan sesuai dengan penyiapan yang telah tersedia.

Menurut David (2009:6) Proses manajemen strategik terdiri atas tiga tahap yaitu: perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi.

Hal ini, dapat diartikan bahwa, dalam membuat sebuah perencanaan dan mengonseptkan sebuah program tentunya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan untuk mencapai perubahan yang signifikan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Olehnya itu, perlu adanya program pengambilan

kebijakan/keputusan strategis agar dapat diimplementasikan dalam sistem organisasi atau lembaga/instansi. Pemerintahan saat ini telah menggaungkan kembali program yang memokuskan pada revolusi mental di seluruh sistem serta para stackholder baik secara vertikal maupun horisontal di semua lembaga Negara. Keberanian dalam menggaungkan kembali spirit revolusi mental. Sebuah pemikiran analitis kolektif secara nasional yang hilang ditelan bumi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Revolusi mental merupakan salah satu kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk mencapai target pembangunan nasional secara merata dan komprehensif.

Kebijakan tersebut, difokuskan dengan program revolusi mental yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga kementerian, yakni : Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. Oleh

karena itu, Presiden Joko Widodo, membuat keputusan dan Instruksi yang tepat dengan kembali menggelorakan gerakan revolusi mental ditengah kegundahan rakyat Indonesia menghadapi masa depan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, dengan Visi dan Misi, Program Prioritas, dan target, strategi yang ingin dicapai oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 34 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Olehnya itu, program revolusi mental juga menjadi salah satu program jangkah menengah dan jangka panjang, agar mencapai Indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkpribadian dalam menghadapi tantangan *global* saat ini dan yang akan datang.

Presiden mengatakan program ini sangat baik dan menjawab berbagai tantangan masa depan bangsa dan negara dan menetapkan dalam RPJM, sehingga diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden (*Inpres*) nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Tujuan dari Revolusi Mental untuk mencapai target pembangunan Nasional secara komprehensif adalah: 1) mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia; 2) membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimisme dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti; 3) mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong.

Gerakan nasional revolusi mental diharapkan agar mampu membangun budaya

yang jujur, bekerja keras, toleransi, berintegritas dan bergotong royong. Tentunya setiap revolusi bisa berlangsung cepat atau lambat, namun yang paling esensial dari revolusi bukanlah pada aspek teknik kecepatannya, melainkan pada unsur sesuatu yang baru (kebaruan) yang ditimbulkan (*newness*). Oleh karena tentunya memiliki berbagai risiko dalam operasionalnya, dengan berbagai penafsiran atau pemahaman yang multi-kompleks untuk mengaplikasikan. Hal ini tidak terlepas dari manajemen risiko, agar segala perencanaan yang dilakukan tentu telah diantisipasi risikonya.

Untuk melakukan sebuah perubahan dalam pengelolaan atau menyusun perencanaan secara sistematis, tentunya memiliki rancangan yang komprehensif dalam melakukan perubahan, baik dari sisi perilaku, karakter dan budaya organisasi. Oleh karena itu, proses untuk mencapai cita-cita perencanaannya, baik secara politik, pemerintahan, pendidikan dan lainnya, sangat diperlukan sebuah kebijakan dan keputusan yang tepat untuk mencapai target, serta efektif dan efisien serta dapat merumuskan proses mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.

Esensi utama dalam gagasan tersebut, terletak pada kehendak untuk merombak cara berfikir, cara bekerja dengan terlebih dahulu menanamkan rasa percaya atas kemampuan dari diri sendiri, menanamkan optimisme serta menekankan daya kreatifitas dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan revolusi mental pada Kementerian Dalam Negeri untuk menanam revolusi mental pada lembaga. Pada setiap peserta dan pegawai perlu ditanamkan untuk dapat merubah dalam dirinya agar melakukan perubahan kearah lebih baik.

Salah satu lembaga kementerian yang sudah melaksanakan pendidikan dan latihan revolusi mental tersebut adalah kementrian Dalam Negeri, yang secara kontinu telah dilaksanakan selain dari tugas rutin seperti menerbitkan E-KTP dan lainnya. Pendidikan

dan latihan (diklat) revolusi mental secara hirarki organisasi sampai pada *stackholder* lainnya. Sasarannya adalah untuk merubah, pola berfikir (*mindset*), etos kerja, dan berjiwa gotong-royong, memiliki integritas, serta bertanggungjawab (akuntabilitas) dalam pengelolaannya. Metode dan model program revolusi mental juga memiliki tata-pengelolaan dalam mendidik dan melatih para staf bahkan pemimpin sampai pada tingkat pemerintahan yang paling kecil, dan para *stackholder* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui salah satu Direktorat Jenderal (dirjen) Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM), melaksanakan pendidikan dan latihan revolusi mental secara struktural untuk memastikan perubahan yang akan dirasakan, dan dilaksanakan secara hirarki organisasi lingkup kementerian sampai di Daerah dan para *stackholder*, sehingga para pemimpin meningkatkan kinerja sesuai dengan cita-cita dan target. Selain itu, telah dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) tahun dalam masa kepemimpinan saat ini, sehingga sudah seharusnya akan dilakukan penelitian, untuk mengetahui perencanaan, implementasi, dan hasilnya (*output*) dari program pendidikan dan latihan kebijakan revolusi mental.

Sistem yang digunakan dalam proses program tersebut tidak terlepas dari menggunakan tata pengelolaan yang telah dibuat dalam *modul* dengan proses perencanaan sesuai target.

Revolusi dari bahasa latin *revolution*, yang berarti berputar arah adalah perubahan fundamental (mendasar) dalam struktur organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relative singkat. Mental adalah cara berpikir atau kemampuan untuk berpikir, belajar, dan merespon terhadap suatu situasi atau kondisi. Mengutip kamus Webster Dictionary (2015:54), kata revolusi punya beberapa makna. Kata revolusi dikaitkan dengan pergerakan sebuah benda seperti bintang atau planet dalam orbitnya.

Dalam kehidupan sehari-hari praktek revolusi mental menjadi manusia yang

berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.

Dari bidang pemerintahan sendiri sudah banyak langkah- langkah yang diambil oleh pemerintah, misalnya reformasi, merubah aturan yang berbelit- belit menerapkan sikap disiplin dalam pemerintahan dan lain- lain.

Prioritas Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla diberi nama Nawa Cita (9 agenda prioritas) (2011:67) :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada segenap seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia.
6. Mewujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinekaan.

Tiga Nilai Revolusi Mental

1. Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab)
2. Kerja Keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif)
3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pendidikan dan pelatihan sudah pasti memiliki peran untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini. Agenda no 6 (enam) diatas sangat relevan untuk diaktualisasikan pada lembaga pendidikan.

Pendidikan akan mempengaruhi orang dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan, jika pendidikannya baik, maka perbuatannya akan baik. Revolusi mental memang harus dimulai dari dunia pendidikan dan secara simultan berjalan dibidang-bidang lainnya. Mengapa dunia pendidikan. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Walaupun secara formal manusia menuntut ilmu pada lembaga pendidikan pada jangka waktu tertentu, namun prinsipnya proses belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat, artinya belajar adalah proses yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti dan terbatas pada dinding kelas. Hal ini didasari pada asumsi bahwa di sepanjang kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah, rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini.

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Pada dunia kediklatan ada 5 standar yang mesti ada untuk dilaksanakan, yakni standar isi,

proses, kompetensi alumni, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana. Sejalan dengan judul diatas maka penulis berpendapat bahwa ada berbagai hal yang harus dan mampu dilaksanakan agar diklat semakin lebih baik, serta menjadi kebutuhan, dengan kata kunci revolusi mental. Demikian pula peserta yang dipanggil mengikuti diklat, diharapkan akan menjadi berubah setelah mengikuti diklat.

Menurut Joyce (2005:77) Revolusi mental memiliki makna luar biasa bagi kemajuan diri sendiri maupun lembaga. Indikator revolusi mental yang ingin dicapai adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Apabila PNS memiliki tiga indikator revolusi mental diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan lebih cepat.

Manusia dalam organisasi dapat diperlakukan sebagai tanaman, ia akan diteliti dan dihargai kebutuhannya, dialokasikan investasi, disediakan program untuk dilatih, dimotivasi, dan dikembangkan secara khusus sampai memperoleh kapasitas paling optimal untuk berkontribusi bagi organisasi.

Tahun 2016 ini pemerintah targetkan 70 persen PNS bisa mengalami revolusi mental. 70 persen itu bisa tiga juta lebih," Kompas (26/5/2016).

Berbagai hal dapat dilakukan oleh Diklat sebagai lembaga yang mendiklat para pegawai, seperti melaksanakan disiplin bagi peserta selama mengikuti kediklatan, tanpa memandang suku, budaya, agama, pangkat, golongan. Satu kata yang memiliki banyak makna,, menurut kamus bahasa Indonesia disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Penerapan disiplin pegawai adalah suatu bentuk pilihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara

komprehensif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerja.

Menurut Amin (2008:98) Pegawai (sumberdaya manusia) dengan segudang harapan menuju ke tempat diklat, dan sebagai lembaga diklat juga memiliki harapan untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar semua dapat berjalan dengan baik. Segala pelaksanaan yang berkaitan dengan keadiklatan akan dapat berjalan dengan baik, apabila pada taraf minimal terjalin komunikasi yang baik. Berbagai langkah dapat dilakukan oleh lembaga untuk melaksanakan revolusi mental diantaranya:

1. Untuk mewujudkan integritas ; sejauhmana mereka memiliki kesatuan sikap, mental, pikiran, tindakan yang selaras dengan nilai- nilai baik, hal yang dapat dilakukan menciptakan budaya kepercayaan, menepati janji, bertanggung jawab, menyadari hal- hal kecil itu penting, konsisten.
2. Untuk mewujudkan etos kerja ; suara hati yang tulus dan ikhlas dari setiap sumberdaya manusia untuk mau bekerja keras tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada setiap orang. Hal yang dapat dilakukan ;melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya, memiliki prakarsa, mentaati segala peraturan, mau bekerjasama,
3. Untuk mewujudkan gotong royong; bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, Hal yang dapat dilakukan memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, keadilan, sukarela, tanggung jawab.

Melaksanakan tiga nilai revolusi mental ini dimulai sekarang dari diri sendiri, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Agar dapat hidup dengan kebenaran dan hikmat, kadang kita harus berlogika dengan diri kita (Meyer 2005:122). John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2002:35), menyatakan bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran,

melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan

Kita ingin menyaksikan terjadinya revolusi mental, dan kita dapat memulainya dari lingkungan kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Mari membangun Indonesia supaya lebih baik lagi, kemajuan bangsa adalah kebanggaan kita semua.

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami keadaan yang berhubungan dengan gejala eksternal maupun internal yang terdapat pada implementasi pendidikan revolusi mental. Secara teoritis metode ini digunakan untuk pencarian data dengan interpretasi yang tepat bertujuan membuat gambaran secara sistematis.

Subjek dalam penelitian ini adalah para pelaksana program pendidikan dan latihan revolusi mental pada Kementerian Dalam Negeri.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan analisis data, yang didapatkan dari proses penemuan data melalui teknik dan jenis data penelitian. Data yang digunakan untuk dianalisis secara deskriptif, dan menyimpulkan dalam bentuk yang bertanggungjawab. Robert K. Yin (2009:98), bahwa: *data analysis consists of examining, categorizing, tabulating, testing, or otherwise recombining evidence, to draw empirically based conclusions*. Artinya: Analisis data meliputi pengujian, pengelompokan, memasukan ke dalam tabel, mengetes, atau menggabungkan kembali bukti-bukti/data, untuk menggambarkan kesimpulan yang berbasis data.

Analisis deskriptif sebagai narasi dalam menyimpulkan data yang dimiliki dalam penelitian. Genzuck dalam Emzir (2017:175)

bahwa deskripsi ditulis dalam narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang dilaporkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi program pendidikan dan pelatihan revolusi mental tersebut, telah terdapat tata cara atau mekanisme manajemen yang sesuai dengan proses manajemen yang secara strategis. Hal ini sebagaimana manajemen strategik telah dilakukan, baik dalam menyusun perencanaan, implementasi serta melakukan monitoring evaluasi terhadap program dan kebijakan yang dilakukan secara jangka menengah maupun jangka panjang dalam periodisasi siklus pemerintahan.

Dalam perencanaan tentunya tidak terlepas dari sistem perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organization*), aplikasi (*Application*), dan control (*Controlling*). Perencanaan selalu digunakan dalam setiap penerapan manajemen baik manajemen perencanaan maupun ilmu manajemen lainnya. Oleh karena manajemen terdapat dua aspek pelaku didalamnya yaitu, manusia dan pengelolaan. Perencanaan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan revolusi mental pada kementerian dalam negeri selama kurang lebih telah berjalan tiga tahun, tentunya disetiap perencanaan yang dilakukan baik secara formal dalam institusi pendidikan formal maupun para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dilakukan perencanaan yang berkesinambungan, dan memiliki proses-proses yang tidak terlepas dari visi, misi, target dan sasaran yang telah dirancang, untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Hal ini jika dilihat sebagaimana sistem perencanaan yang telah disebutkan bahwa, perencanaan harus memiliki beberapa aspek dalam mendesain adalah *Planning, organization, application, and controlling*.

Planning, adalah merencanakan rancangan yang strategis dalam desain program-program yang memiliki visi, misi, tujuan, target, dan sasaran yang akan dicapai. *Organizatioan*, adalah dalam perencanaan tersebut akan dilakukan pengorganisasian terhadap perencanaan yang direncanakan baik secara system yang mengelola ataupun personality, atau bagian-bagian sesuai dengan yang telah dikonsepsikan dalam rancangan tersebut.

Application, adalah melakukan atau melaksanakan rencana yang telah direncanakan sebagaimana visi, misi, tujuan target dan sasaran. Oleh karena itu, maka pelaksanaan atau diimplementasikan melalui program-program yang telah di rancang secara stretgis dan memiliki tujuan dan target serta sasaran yang akan dicapai.

Controlling, adalah dalam perencanaan yang sudah ditetapkan kemudian diorganisasikan serta dapat dilaksanakan tentunya dilakukan control untuk memastikan semua program yang dilakukan sesuai dengan target dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai, dan jika terdapat kekurangan atau kelebihan didalamnya maka, dapat direkomendasikan untuk menjadi perubahan dalam rancangan berikutnya.

Berdasarkan pengertian dan cara pelaksanaan perencanaan dalam setiap manajemen maka peneliti menemukan beberapa temuan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen/dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan revolusi mental melalui program pemerintah yang dilandaskan pada empat konsesus yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka Pemerintah saat ini, melaksanakan program Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai salah satu program staretgis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Pajang peroidesasi yang disebut sebagai Program Pembangunan

NAWACITA. Dalam program tersebut salah satu pointernya adalah meningkatkan nilai karakter bangsa. Hal ini, dilakukan dengan membuat program kebijakan menuju sebuah perubahan bangsa adalah baik pada sistem kelembagaan Negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, program revolusi mental dilakukan dengan kebijakan secara nasional. Gerakan tersebut memiliki berbagai sasaran sebagaimana penjelmaan dari beberapa Kementerian/Lembaga Negara salah satunya Kementerian Dalam Negeri, dengan Gerakan Indonesia Bersatu. Maka merancang atau melakukan perencanaan baik secara formal maupun informal yang didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016, kemudian Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Permenko PMK Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal ini diberikan tugas kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi, maupun pendidikan dan pelatihan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi dan instruktif wilayah kerja.

Melalui Kementerian Dalam Negeri, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau Gugus pada tataran kememnterian/Lembaga, dan kementerian Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Politik, Hukum, dan Pemerintahan melakukan perencanaan secara startegis yang dilaksanakan secara teknis oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri. Hal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dengan merancang perencanaan melalui mekanisme birokrasi yang ditransformasikan dalam bentuk tugas pokok maupun tambahan untuk melaksanakan program diklat tersebut.

Dalam mendesain pelaksanaan pendidikan tesebut, adalah melakukan

rancangan terhadap Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri (SPSDMPDN). Hal ini dilakukan agar dapat secara teratur dan bertanggungjawab oleh para ASN yang berada pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama secara langsung mengkoordinir, dan kemudian dilakukan pengesahan terhadap tim yang sangat substansial untuk melaksanakan penyusunan perencanaan yang disebut dengan Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri (SPPDN). Kemudian tim ini, yang melakukan penyusunan perencanaan melalui tahapan yang telah menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, perencanaan yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan revolusi mental pada Kementerian Dalam Negeri telah sesuai dengan salah satu hakekat dari manajemen strategis, yaitu dilakukan *planning, diorganisasikan, diaplikasikan* dan *pengontrolan*.

Implementasi adalah melaksanakan, melakukan, atau mengaplikasikan sebuah perencanaan yang telah direncanakan dengan tujuan, target, dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemerintahan maupun non pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan revolusi mental pada Kementerian Dalam Negeri yang pelaksanaan secara teknisnya adalah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dan lebih spesifik lagi dilaksanakan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini telah dilakukan baik secara formal maupun informal yang melibatkan para Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM).

PPRM adalah para praja yang melaksanakan studi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Praja yang melanjutkan studi selama kurang lebih

1-3 tahun. Kemudian KPRM adalah para praja IPDN yang sudah dalam tahap akhir studi, maupun yang diberikan tugas uji coba pada daerah-daerah. Sedangkan APRM adalah para praja yang telah lulus kemudian menjadi ASN dan para ASN dilingkupi kementerian dan sampai pada daerah (Provinsi dan Kab/Kota).

Pelaksanaan diklat tersebut baik informal maupun formal bertujuan untuk melatih, membina dan dapat diaplikasikan baik sebagai pengawas, instruktur/widyaswara, fasilitator, dan administrator, telah dilaksanakan di pusat maupun di daerah (provinsi dan Kab/kota), selama kurang lebih tiga tahun. Sehingga para praja, kader maupun aparatur antusias dan dapat merubah pola berfikir, kinerja dan sikap kehidupan yang mengalami perubahan dalam diri sendiri, lingkungan, dan sikap yang sesuai harapan tujuan dan target revolusi mental.

Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa implementasi program pendidikan dan pelatihan kebijakan revolusi mental menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan Negara yang perlu ditingkatkan agar bangsa ini terlepas dari segala cengkaman baik, dari aspek pola berfikir, meningkatkan integritas sebagai bangsa dan meningkatkan etos kerja yang penuh bertanggungjawab serta merubah cara hidup atau pola hidup saling menghormati, bekerjasama, dan bergotong royong dalam kepentingan bangsa dan Negara.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kata yang sama dalam dalam pelaksanaannya, namun tidak sama fungsinya. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Monitoring adalah, melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi dan misi, target tujuan dan sasaran. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas.

Berdasarkan penelitian hasil temuan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan revolusi mental, memiliki hasil yang sangat baik dalam program tersebut. Pembuktian itu terjadi pada perubahan dalam pola berfikir, peningkatan kinerja, dan system kerjasama antara sesama secara hirarki struktural maupun horizontal serta dapat dirasakan perubahan tersebut di masyarakat. Hal ini, telah dilaksanakan pada internal kementerian Dalam Negeri maupun di Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), sesuai dengan petunjuk proses monitoring dan evaluasi sesuai peraturan menteri dan edaran yang telah diberikan.

Monitoring dan evaluasi (monev), dilakukan agar dapat mengetahui, hasil pelaksanaan, jika perlu mendapat temuan akan menjadi rekomendasi dalam program atau kegiatan tersebut, dan merupakan kegiatan yang berkelanjutan maka sangat penting untuk dilakukan monitoring/evaluasi.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pendidikan revolusi mental adalah untuk mengetahui, menyaksikan, mendorong, dan memotivasi serta menjadi pelopor agar yang telah didik sebagai instruktur, administrator dan sebagai kader pelopor revolusi mental selalu siap dan mampu menjadi aparatur yang pola berfikir demi integritas dan bekerja keras untuk merubah gaya hidup yang sederhana bahkan bergotong royong dalam bertugas, bekerja, dan bertanggungjawab. Kegiatan monitoring/evaluasi menjadi salah satu proses untuk dapat menjadi rekomendasi dalam peningkatan kegiatan sesuai dengan visi, misi, target, tujuan dan sasaran serta hasil sebagaimana diharapkan.

PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menetapkan rencana strategis, operasional dan melakukan

monitoring/evaluasi sehingga dapat mendekteksi dan mengetahui keberhasilan dari suatu perencanaan yang dirancang. Kegiatan perencanaan tidak hanya dilakukan oleh manajer atas, tetapi dilakukan oleh manajer tengah sampai pada manajer bawah bahkan semua elemen yang terlibat dalam suatu organisasi/lembaga.

Dalam merencanakan sebuah tujuan yang ingin diraih atau dicapai, maka tentu memilih atau memiliki serta memutuskan dan juga mendefinisikan tujuan, sasaran target dan menetapkan strategi untuk mengelola aktivitas yang akan dilaksanakan. Hal ini, menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter yang dikutip Karyoto (2016:52) bahwa perencanaan adalah mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rancangan kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas.

Dengan adanya aturan diberbagai segmen kegiatan, semua pekerja difungsikan sesuai posisi, jabatan, dan kemampuannya. Dan kemudian para pekerja dapat memahami, mengatur waktu dan menjadikan panduan untuk bekerja. Kaitannya dengan perencanaan program pendidikan dan latihan kebijakan revolusi mental yang telah direncanakan tersebut, telah memiliki desain yang bersifat berkelanjutan untuk dapat memastikan berbagai kendala, hambatan, dan peluang serta solusi dalam segala bentuk sasaran, tujuan, target dan strategi.

Dari penjelasan tersebut di atas sesuai dengan penuturan kepala seksi Direktur Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri (Bapak Yodi Indarwan, 2018), bahwa, perencanaan dalam program pendidikan dan latihan kebijakan revolusi mental adalah dilakukan secara struktural kelembagaan, baik pusat maupun daerah, pembekalan kepemimpinan dengan jumlah yang lumayan banyak, membentuk pengawas untuk mengawasi, dan tim monitoring/evaluasi (monev), dan membentuk struktur organisasi dalam mengorganisir dalam bentuk kelompok kerja

(pokja) baik ditingkat pusat maupun sampai pada tingkat Daerah kabupaten dan Kota.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan amat sangat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi yang berhasil, terutama karena aktivitas keorganisasian, motivasi dalam mewujudkan hasil yang baik.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan oleh Koordinator Sekretariat Revolusi Mental Kementerian Dalam Negeri (Bapak Wawan Hermawan) sekaligus sebagai Wakil Ketua Penyusunan Substansi Revolusi Mental, bahwa dalam perencanaan bertujuan agar pola pikir, pola kerja dan pola hidup dapat menjadi baik dan bertanggungjawab, serta merasa memiliki secara penuh dalam bertugas. Selain itu, dalam perencanaan menyusun materi, mengikuti aturan secara administrasi, aturan secara substansi, baik ASN, Ormas, LSM, serta Akademisi dalam menyusun sistem pengembangan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, dengan memiliki Surat Keputusan/Surat Tugas.

Hal ini disampaikan oleh salah satu Widyaswara/Instruktur Revolusi Mental dan Bela Negara (Ibu Diah), bahwa sebagai ASN kami selalu memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan pimpinan baik secara organisasi vertikal maupun horizontal yang diberikan tugas untuk melaksanakan dan menyusun *Standar Kompetensi, Silabus*, untuk menjelaskan kepada peserta. Selain itu juga perencanaan tersebut dilaksanakan penuh oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Dalam menyusun perencanaan secara struktural dengan menggunakan mekanisme ASN, karena yang melaksanakan tersebut adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) pula, dengan demikian melalui struktur organisasi dengan jabatan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut direncanakan untuk melatih (*Trainer Of Trinner*) bagi para instruktur, pengawas, dan

administrator serta peserta. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pamong Praja, bahwa dalam perencanaan baik waktu, dan anggaran mengarah pada pembuatan modul atau menyusun bahan, melakukan *trainer of trinner* terhadap para tim yang akan ditugaskan di daerah, pengawas, operator (CTC), yang dikelola oleh Badan Pamong Praja.

Oleh sebab itu, dalam menyusun atau mendesain perencanaan maka, keseluruhan proses perencanaan adalah proses yang paling ampuh untuk mengembangkan rasa kesatuan dan saling mendukung diantara sesama anggota tim manajemen, baik pada tingkat yang paling tinggi sampai pada *stacholder* yang lain, yang memiliki komitmen masa depan yang ingin dicapai atau diraih.

Menurut Ario Santiko salah satu Widyaswara perencanaan sesuai regulasi, penyusunan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan perangkat pembelajaran.

Implementasi adalah salah satu proses yang telah dilaksanakan, dilakukan, atau diaplikasikan, pada individu, organisasi kemasyarakatan dan bahkan institusi Negara. Implementasi dalam ilmu manajemen adalah pelaksanaan dari perencanaan yang strategis, bersifat paten dan berkelanjutan. Yang dilakukan atau dilaksanakan adalah program yang dianggap strategis, dan terukur secara terarah, dan memiliki ukuran baik secara tahunan maupun bulanan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan dan latihan kebijakan revolusi mental, yang telah direncanakan secara strategis, melalui institusi untuk setiap tahunan dalam periodisasi. Misalnya dalam pelaksanaan pemerintahan, sosial, ekonomi maupun sector lainnya, tentunya memiliki program yang strategis untuk dilaksanakan secara bertahap atau tahunan. Pelaksanaan program diklt kebijakan revolusi mental yang telah dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, maka Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental Indonesia Bersatu,

dengan memiliki perencanaan strategis melalui berbagai tujuan, sasaran dan target yang telah direncanakan secara sistematis dan tentunya bertahap secara tahunan. Hal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini, dan setiap tahunan memiliki target dan sasaran yang terukur.

Dalam pelaksanaan program kebijakan ini, karena pelaksananya adalah ASN, maka tentunya memiliki tata cara yang telah diatur sesuai dengan struktur, jabatan, maupun tugas secara administrasi, pengawasan, instruktur/widyaswara, kelompok kerja yang terbentuk secara hirarki organisasi baik di tingkat pusat maupun sampai pada daerah (provinsi dan kab/kota).

Implementasi program pendidikan dan latihan revolusi mental sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan sebagai pelaksana Aparatur maka tentunya memiliki tugas dan fungsi yang telah diberikan diantara adalah pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat kebangsaan.

Sebagai perekat kebangsaan tentunya di didik untuk menjadi aparatur yang memiliki pola berfikir, etos kerja dan kegotong-royongan disamping melaksanakan fungsi dan tugas lainnya yang melekat. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Hukum Pemerintahan Dalam Negeri bahwa, aparatur pelopor revolusi mental memiliki peran yang sangat bervariasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai perekat kebangsaan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan melalui revolusi mental agar benar-benar menjadi pelayanan yang baik, melaksanakan kebijakan, dan menjadi perekat bangsa baik secara internal ASN maupun pada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri, telah melaksanakan program pendidikan dan latihan revolusi mental sejak Tahun 2015, yang sasarannya pada Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM).

Hal ini sejalan dengan penjelasan Direktorat Badan Politik, Pemerintahan dan Hukum (BOLPUM) Kementerian Dalam Negeri (Prabawa), Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM), adalah para praja yang melaksanakan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), selama kurang lebih 1- 4 Tahun. Berkaitan dengan ini target Kementerian Dalam Negeri agar para lulusan praja tersebut menjadi Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), kemudian menjadi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM).

PPRM, mengikuti pendidikan dan latihan selama 1-4 tahun tersebut, dibekali dengan segala bentuk ilmu pemerintahan, birokrasi, administrator, kepemimpinan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya ditanamkan nilai-nilai revolusi mental didalamnya agar para praja dapat mengaplikasikan dilingkungan kerja, lingkungan masyarakat, baik diperkotaan samapai pada level Negara.

Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), adalah para praja yang telah melaksanakan akhir studi pada IPDN dan diberikan tugas uji coba selama kurang lebih 3-6 bulan di Daerah-daerah, tentunya mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) revolusi mental, agar mampu berfikir, bekerja keras, dan memiliki sikap gotong royong sebagai aparatur yang memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan. Hal ini, para kader praja menjadi pelopor, atau menjadi panutan bagi ASN yang memiliki nilai-nilai revolusi mental tersebut.

Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), adalah para praja yang diangkat sebagai ASN maupun ASN yang ada dilingkup pusat dan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Politik Pemerintahan dan Hukum (POLPUM) Kementerian Dalam Negeri, bahwa bagi setiap PPRM, KPRM dan APRM, dididik, dibina, dilatih, dan dibekali untuk dapat menjalankan kebijakan

pemerintah, melakukan peyanan dan sebagai perekat Bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, dalam mendidik, melatih, membina dan membekali setiap peserta baik pendidikan formal (Sekolah/Perguruan Tinggi) dan Informal (lembaga pendidikan dan Pelatihan yang bertanggungjawab), bukan hanya didik secara teoritis semata dan pengetahuan (*knowledge*), Namun dilakukan penggodoka secara berkesenambungan menjadi aparatur/ASN yang dapat bertanggungjawab dalam mengaplikasikan nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pada esensinya, PPRM, KPRM dan APRM mengikuti DIKLAT untuk mampu melakukan perubahan dan merubah pola piker, memiliki etos kerja yang tinggi, bersaing, dan memiliki pola hidup gotong royong. Hal ini, adalah merupakan sebagai budaya dan tradisi kebangsaan Indonesia sejak dahulu.

Menurut Thomas Lickona yang dikutip Hendarman (2015:48), *School Must help children understand core values, adopt commit to them, and then act upon them in their own lives*. Artinya, dalam pendidikan karakter, sekolah/kampus harus mendorong peserta didik untuk mampu memahami nilai-nilai moral yang baik (*moral knowing*), mampu merasakan nilai-nilai luhur itu ke lubuk hati yang paling dalam (*moral feeling*), dan akhirnya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan apa yang di ketahui dan dirasakannya ke dalam tindakan nyata (*moral action*).

Hal ini pun di ungkapkan Megawangi dikutip Hendarman bahwa dalam implementasinya ada empat aspek yang harus dilakukan pembentukan watak, sebagai berikut : 1). Perhatian pada sisi emosional peserta didik, seperti menghargai diri sendiri (*self-respect*), *kemampuan ber-empathy*, dapat menahan diri (*self-control*) dan rendah hati. 2). Meningkatkan *life- skill*, seperti kemampuan mendengarkan orang lain dan kemapuan berkomunikasi. 3). Menumbuhkan

kemauan (*will*), seperti menguatkan niat dan menghimpun tenaga untuk melaksanakan prinsip-prinsip luhur dalam kehidupan nyata. 4). Pembiasaan (*habit*), yakni pengembangan sikap untuk merespons berbagai situasi dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, berbagai pola interaksi sehat merupakan tumbuhnya sebuah komunitas responsif untuk menandai sebuah komunitas yang bersifat non-represif. Untuk dapat menjadikan pendidikan tidak hanya menghasilkan insan yang cerdas, tetapi terlebih penting adalah berkarakter atau pembentukan watak.

Implementasi diklat revolusi mental, berfokus pada nilai-nilai revolusi mental agar para Aparatur dan masyarakat dapat merubah cara berfikir atau pola berfikir (*mindset*), cara kerja yang tinggi atau etos kerja, dan cara hidup yang memiliki kebersamaan atau bergotong-royong.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan organisasi dengan tujuan agar informasi yang diperoleh hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya. Sedangkan menurut OECD (1998:137) disebutkan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta yang sedang berjalan.

Dengan konseptual tersebut di atas sejalan dengan pendapat Yodi Indrawan Kepala Seksi Karakter Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan bahwa proses evaluasi sudah dilaksanakan seperti pelayanan administrasi dan proses

monitoring evaluasi selalu dilakukan pada tahun berjalan untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya.

Dalam hal *monitoring* evaluasi dapat dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. *Monitoring* evaluasi mengarah pada kegiatan hasil produk dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan dalam kebijakan organisasi. Secara prinsip *monitoring* evaluasi dilakukan pada kegiatan berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan pencapaian sesuai rencana atau tidak. Hal ini bila ditemukan penyimpangan maka, dapat dibenahi sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan targetnya. Jadi hasil *monitoring* evaluasi menjadi (*input*) bagi kepentingan organisasi.

Hal yang sama sesuai dengan penuturan Eka Triwulansari Widyaswara Nasional bahwa monitoring evaluasi terfokus pada berapa banyak alumni yang mengikuti pendidikan revolusi mental, mengukur implementasi revolusi mental pada tempat kerja masing-masing yang dimulainya sejak dini dengan penataan yang berkelanjutan untuk menggerakkan organisasi.

Oleh karena itu, dalam setiap proses kebijakan Pemerintah perlu adanya relevansi tataran Pemerintahan sehingga diharapkan memenuhi kelayakan sebagai pedoman untuk melaksanakan revolusi mental secara komprehensif kepada aparatur negara dan masyarakat meliputi tiga dimensi perubahan yaitu revolusi kultural, revolusi fungsional, dan revolusi struktural.

KESIMPULAN

Pendidikan dan latihan (DIKLAT) merupakan salah satu proses untuk membina, melatih, dan menggodok. DIKLAT

bertujuan untuk membentuk watak dan karakter serta menanamkan nilai-nilai revolusi mental yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat serta lingkungan perkotaan bahkan sampai pada instansi/Negara.

Perencanaan yang dilakukan sangat strategis untuk diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan serta menjadi terobosan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diklat memiliki sistem pengelolaan yang strategis, praktis, dan masif untuk mencapai target dan sasaran yang berkesinambungan. Sasaran tersebut pada Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), yang memiliki cara berfikir yang loyal, dan bertanggungjawab (*Integritas*), Cara kerja yang inovatif, kreatif dan progresif (*etos kerja*) serta cara hidup yang bergotong-royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Budiningsih, 2004. Pembelajaran Moral, Rineka Cipta, Jakarta
- Amin Ibrahim, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Mandar Maju, Bandung
- Darmin Ahmad, 2012. Talent Management, Gramedia, Jakarta
- Doni Koesoema, 2015 Strategi Pendidikan Karakter, Revolusi Mental dalam Pendidikan, Kanisius Yogyakarta
- Heri Gunawan, 2011. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi Alfabeta, Bandung
- Joyce Meyer, 2005. Mengelola Emosi Anda, Gospel Press, Batam
- Mundzier Suparta, 2012, Selamatkan Bangsa dari Korupsi, Inspektorat Kemenag RI
- Madya Utama, 2002, Dinamika Hidup Beriman, Kanisius, Yogyakarta

Wibowo, 2011. Manajemen Kinerja,
Rajagarfindo, Jakarta

Bahan Ajar Pelatihan Revolusi Mental Bagi
ASN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Fungsional tahun 2016

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara